

BAB IV ANALISIS

4.1. Analisis Model

4.1.1. Uji Spesifikasi Model

4.1.1.1. Analisis Uji Chow

Berdasarkan hasil uji-Chow diketahui bahwa model terbaik yang menjelaskan tingkat kemiskinan absolut, tingkat kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan adalah model *Fixed Effect* dan bukan model *Pooled Least Square* (Tabel 4.1.)

Tabel 4.1. Hasil Uji Chow

SSR	Indikator Kemiskinan		
	P ₀	P ₁	P ₂
PLS	717,44	115,17	15,24
Fixed Effect	80,58	14,16	2,96
F statistik	20,55	33,10	19,08
F Tabel*	1,68	1,44	1,44
Model Pilihan	Fixed Effect	Fixed Effect	Fixed Effect

Keterangan: *Tingkat signifikansi 10%

4.1.1.2. Analisis Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji-Hausman diketahui bahwa semua indikator kemiskinan memiliki nilai Hausman statistik yang lebih kecil dibandingkan nilai Chisquare- tabel. Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang menjelaskan semua indikator kemiskinan adalah model GLS - *Random Effect* (Tabel 4.2.)

Tabel 4.2. Hasil Uji Hausman

Indikator Kemiskinan	Hausman Statistik	Tabel Chisquare	Model Pilihan
P ₀	17,70	19,68**	Random Effect
P ₁	9,28	17,28*	Random Effect
P ₂	14,99	17,28*	Random Effect

Keterangan: **/*: masing-masing signifikan pada alfa: 5%, 10%

4.1.2. Analisis Uji-t Model Terbaik

Berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa variabel tingkat melek huruf dengan lag dua tahun secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin, sedangkan variabel tingkat melek huruf tanpa lag signifikan mengurangi tingkat keparahan dan kesenjangan kemiskinan. Sementara variabel rata-rata lama sekolah dengan lag satu tahun terbukti mengurangi tingkat kemiskinan absolut dan variabel rata-rata lama sekolah yang dilogkan secara signifikan mengurangi tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan. Jadi secara keseluruhan variabel pendidikan terbukti mengurangi semua indikator kemiskinan.

Sedangkan determinan kemiskinan karakteristik Aksesibilitas dan Rumah tangga khususnya variabel rumah tangga dengan akses air bersih terbukti mengurangi tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan. Sedangkan variabel Rumah tangga dengan akses listrik secara signifikan terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan absolut. Adapun variabel layanan kesehatan Puskesmas Keliling (prosentase rasio Puskesmas Keliling terhadap luas wilayah) terbukti mengurangi tingkat kemiskinan absolut.

Determinan kemiskinan karakteristik makro yaitu variabel pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto secara nyata signifikan mengurangi tingkat kemiskinan absolut dan tingkat keparahan kemiskinan. Bahkan variabel rasio pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara signifikan terbukti mampu mengurangi semua indikator kemiskinan. Sementara variabel rasio pertumbuhan sektor industri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti signifikan mengurangi tingkat kemiskinan absolut (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Faktor Penyebab Kemiskinan di 26 Propinsi
(Variabel Terikat: Indikator Kemiskinan)

Variabel Bebas	Random Effect - Regression		
	P ₀	P ₁	P ₂
Karakteristik Individu			
Tingkat Melek Huruf	-	-0,054* (0,030)	-0,022** (0,009)
Tingkat Melek Huruf (-2)	-0,179* (0,103)	-	-
Rata-rata lama sekolah (log)	-	-0,460*** (0,145)	-0,089* (0,051)
Rata-rata lama sekolah (-1)	-0,163*** (0,079)	-	-
Karakteristik Aksesibilitas & Rumah Tangga			
Rumah tangga dengan akses listrik	-0,065** (0,031)	-0,010 (0,008)	-0,005 (0,005)
Rumah tangga dengan akses air bersih	-0,002 (0,016)	-(0,003)* (0,002)	-0,003** (0,001)
Rasio Puskesmas Keliling terhadap luas wilayah (%)	-0,280** (0,126)	-	-
Rasio Puskesmas Keliling terhadap luas wilayah (log)	-	-0,031 (0,033)	-
Rasio Puskesmas Keliling terhadap luas wilayah			-0,698 (2,914)
Karakteristik Makro			
Pertumbuhan PDRB	-0,210*** (0,013)	-0,010 (0,011)	-0,021*** (0,006)
Rasio Pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB	-0,586*** (0,170)	-0,086*** (0,027)	-0,051* (0,030)
Rasio Pertumbuhan sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB	-0,036* (0,018)	0,003 (0,003)	-0,001 (0,002)
Variabel Kontrol			
Share NTB sektor pertanian terhadap PDRB	0,056 (0,051)	-0,002 (0,007)	0,012 (0,024)
Tingkat kemiskinan periode awal	0,511*** (0,083)		
Tingkat kemiskinan periode awal (-1)		(0,334)*** (0,088)	(0,289)*** (0,029)
Rata-rata lama sekolah dikali Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	0,004 (0,009)	0,002 (0,001)	-0,001 (0,001)
Konstanta	28,52***	4,42*	4,197***
Adjusted R ²	0,62	0,41	0,57
N	102	153	152

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai *Standar error*. ***/**/*: signifikan masing-masing pada alfa 1%, 5%, dan 10%.

4.2. Analisis Kemiskinan di 26 Propinsi

4.2.1. Analisis *Individual Effect* Penyebab Kemiskinan di 26 Propinsi

Jika dilihat berdasarkan hasil uji t, perbedaan konstanta individual effect antar 26 propinsi untuk semua indikator kemiskinan secara signifikan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik determinan untuk semua indikator kemiskinan antar 26 propinsi adalah berbeda nyata.

Untuk indikator P_0 , maka berdasarkan nilai pada Tabel 4.4. dapat diinterpretasikan bahwa bila mana ada perubahan pada semua variabel bebas baik antar individu maupun antar waktu, maka propinsi Sumut akan mendapatkan pengaruh individu terhadap tingkat kemiskinan absolut- P_0 (Y) lebih besar 8,76% dibandingkan dengan Kalteng. Selanjutnya diikuti oleh propinsi NAD sebesar 8,18%, Irian Jaya 7,69%, DIY 6,57%, Bengkulu 6,44%, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Jambi sebesar 0,63%. Semuanya adalah relatif terhadap propinsi Kalteng yang memiliki individual effect terhadap tingkat kemiskinan absolut paling rendah diantara semua propinsi di Indonesia (Tabel 4.4).

Untuk interpretasi individual effect pada indikator P_1 adalah bila mana ada perubahan pada semua variabel bebas baik antar individu maupun antar waktu, maka propinsi NAD akan mendapatkan pengaruh individu terhadap tingkat kesenjangan kemiskinan- P_1 (Y) lebih besar 4,54% dibandingkan dengan Kalbar. Selanjutnya diikuti oleh propinsi Sulut 3,15%, Bengkulu 2,85%, DIY 2,76%, Sulteng 2,35% dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Jabar sebesar 0,38%. Semuanya adalah relatif terhadap propinsi Kalbar yang memiliki individual effect terhadap tingkat kesenjangan kemiskinan paling rendah diantara semua propinsi.

Dan untuk interpretasi individual effect pada indikator P_2 adalah bila mana ada perubahan pada semua variabel bebas baik antar individu maupun antar waktu, maka propinsi NAD akan mendapatkan pengaruh individu terhadap tingkat kesenjangan kemiskinan- P_1 (Y) lebih besar 1,57% dibandingkan dengan Kalbar. Selanjutnya diikuti oleh propinsi Sulut sebesar 1,11%, Sulteng 1,02%, Bengkulu 1,00%, DIY 0,99%, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah NTT sebesar 0,29%.

Tabel 4.4. *Individual Effect* tingkat kemiskinan di 26 Propinsi

P ₀		P ₁		P ₂	
Individu	IE Nilai Relatif	Individu	IE Nilai Relatif	Individu	IE Nilai Relatif
_SUMUT--C	8,76	_NAD--C	4,54	_NAD--C	1,57
_NAD--C	8,18	_SULUT--C	3,15	_SULUT--C	1,11
_IRJA--C	7,69	_BENGKULU--C	2,85	_SULTENG--C	1,02
_DIY--C	6,57	_DIY--C	2,76	_BENGKULU--C	1,00
_BENGKULU--C	6,44	_SULTENG--C	2,35	_DIY--C	0,99
_JATENG--C	5,79	_KALTIM--C	2,20	_MALUKU--C	0,82
_JATIM--C	5,40	_IRJA--C	2,13	_IRJA--C	0,80
_LAMPUNG--C	5,16	_NTB--C	2,02	_SUMUT--C	0,78
_NTB--C	5,11	_MALUKU--C	2,00	_KALTIM--C	0,73
_SUMSEL--C	4,99	_LAMPUNG--C	1,71	_LAMPUNG--C	0,72
_SULTENG--C	4,81	_SUMUT--C	1,63	_DKI--C	0,70
_JABAR--C	4,36	_RIAU--C	1,61	_SUMSEL--C	0,68
_SULTRA--C	4,01	_SUMSEL--C	1,54	_RIAU--C	0,67
_MALUKU--C	3,78	_JATENG--C	1,46	_JATENG--C	0,62
_NTT--C	3,57	_DKI--C	1,38	_SUMBAR--C	0,57
_KALTIM--C	3,33	_SUMBAR--C	1,36	_JATIM--C	0,55
_RIAU--C	3,33	_JATIM--C	1,22	_KALTENG--C	0,54
_SUMBAR--C	3,15	_KALSEL--C	1,16	_NTB--C	0,53
_SULUT--C	2,60	_JAMBI--C	1,11	_KALSEL--C	0,45
_BALI--C	2,29	_BALI--C	1,08	_SULTRA--C	0,42
_DKI--C	1,75	_KALTENG--C	0,98	_JAMBI--C	0,41
_SULSEL--C	1,36	_SULTRA--C	0,91	_BALI--C	0,39
_KALSEL--C	1,27	_SULSEL--C	0,86	_JABAR--C	0,35
_KALBAR--C	1,23	_NTT--C	0,68	_SULSEL--C	0,30
_JAMBI--C	0,63	_JABAR--C	0,38	_NTT--C	0,29
_KALTENG--C	0,00	_KALBAR--C	0,00	_KALBAR--C	0,00

Keterangan: Nilai individual effect relatif terbesar terurut dari atas kebawah.

Secara keseluruhan ada tiga propinsi yang memiliki *individual effect* paling besar terhadap semua indikator kemiskinan, propinsi tersebut adalah NAD Sulut dan Bengkulu. Sedangkan tiga propinsi yang memiliki individual effect paling rendah terhadap semua indikator kemiskinan adalah Kalbar, Kalteng, dan Jambi (Tabel 4.4). Dan salah satu penyebab perbedaan nilai individual effect

masing-masing propinsi terhadap ketiga indikator kemiskinan adalah disebabkan perbedaan pada masing-masing indikator yaitu pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

Propinsi-propinsi yang memiliki individual effect terendah diantaranya DKI, Sulsel, Kalsel, Kalbar, Jambi, Kalteng secara keseluruhan memiliki indikator pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok propinsi yang memiliki individual effect tertinggi seperti propinsi Sumut, NAD, Irian Jaya, DIY, dan Bengkulu. Dengan kata lain dampak perbaikan pada masing-masing indikator tersebut terhadap penurunan tingkat kemiskinan lebih tinggi effectnya bagi propinsi Sumut, NAD, Irian Jaya, DIY, Bengkulu dan propinsi lainnya yang memiliki nilai individual effect relatif lebih tinggi dibandingkan propinsi-propinsi yang memiliki nilai individual effect relatif rendah seperti DKI, Sulsel, Kalsel, Kalbar, Jambi, Kalteng.

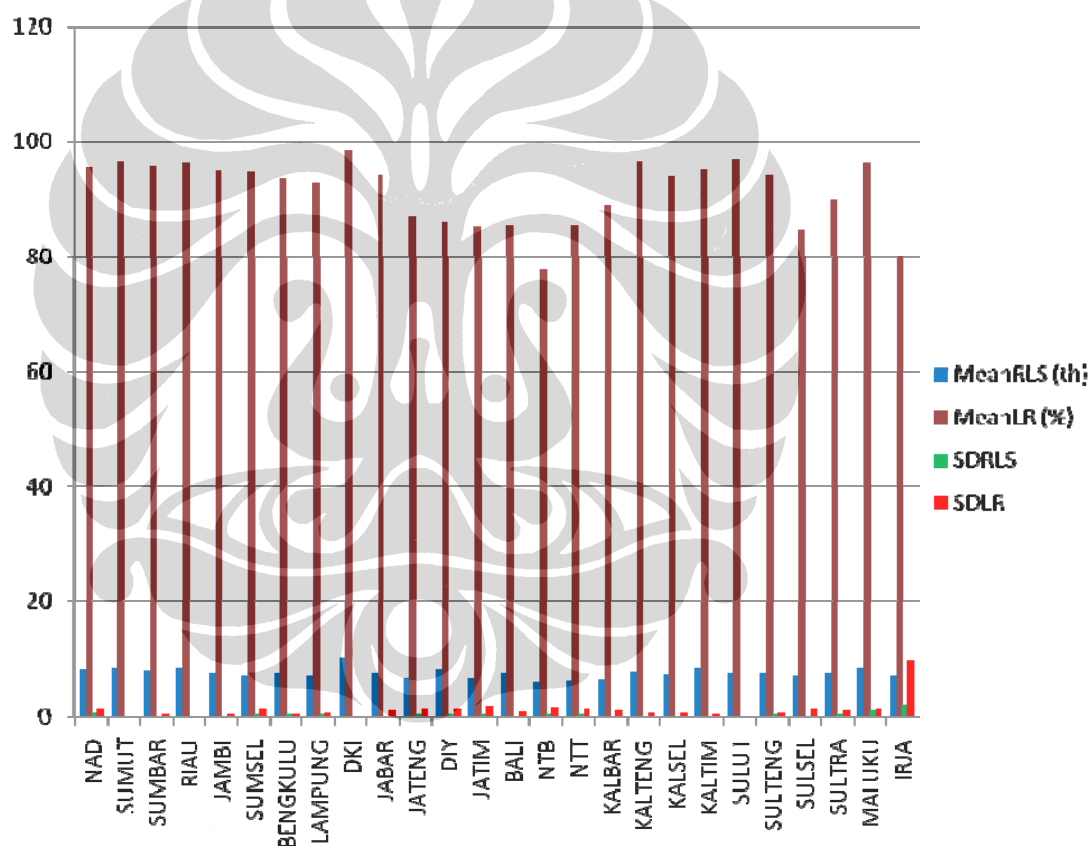
4.2.2. Analisis Deskriptif Perbedaan Karakteristik Determinan Kemiskinan di 26 Propinsi

4.2.2.1. Karakteristik Individu

Berdasarkan Gambar 4.1. diketahui bahwa angka rata-rata lama sekolah (RLS) antar 26 propinsi sejak tahun 2002-2007 secara keseluruhan diatas 7,49 tahun. Adapun propinsi dengan angka RLS tertinggi adalah DKI yaitu 10,03 tahun, sedangkan propinsi dengan RLS terendah adalah NTB sebesar 5,97 tahun. Dan berdasarkan angka standar deviasi RLS (SDRLS) pada masing-masing propinsi, semuanya memiliki SDRLS yang hampir sama yaitu dibawah 1, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah antar penduduk selama periode 2002-2007 di masing-masing propinsi relatif stabil kecuali Irian Jaya. Adapun propinsi Irian Jaya mempunyai SDRLS sebesar 1,81 yang menunjukkan bahwa penambahan angka rata-rata lama sekolah selama tahun 2002-2007 di Irian Jaya sangat bervariasi dibandingkan 25 propinsi lainnya.

Sedangkan rata-rata tingkat literasi (LR) antar 26 propinsi adalah 91,34 %. Adapun propinsi dengan angka LR tertinggi adalah propinsi DKI sebesar 98,38%.

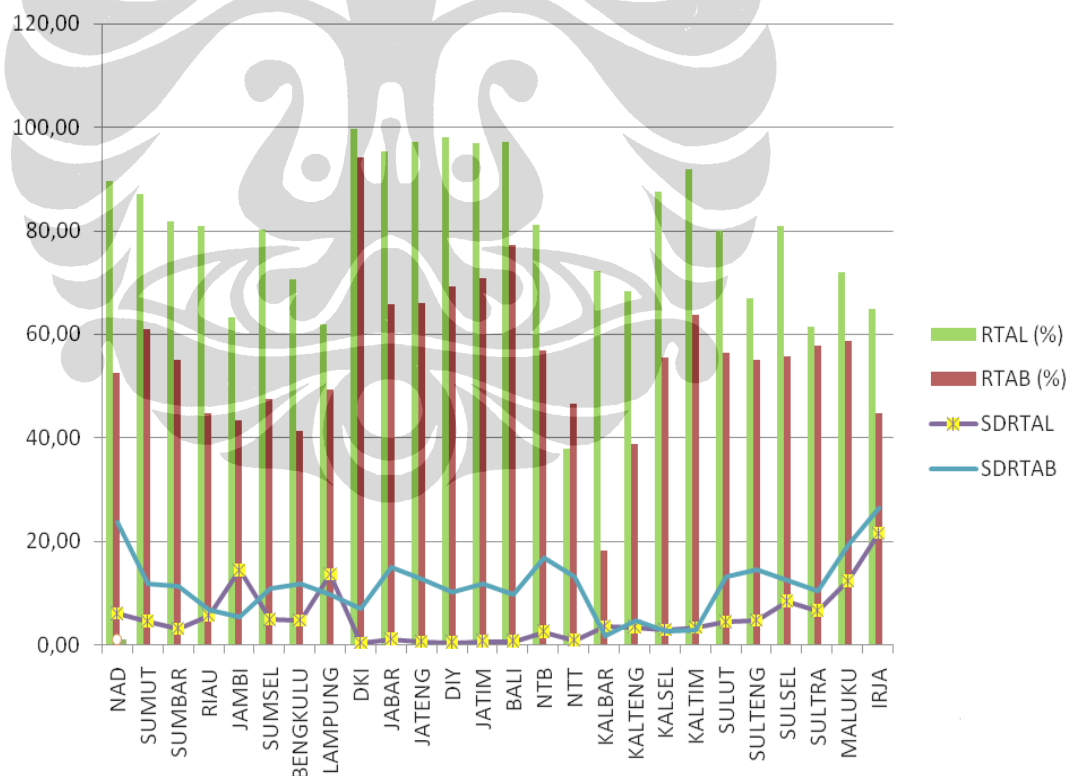
Sementara propinsi dengan angka LR terendah adalah NTB (77,86%). Dan berdasarkan angka standar deviasi LR (SDLR) pada masing-masing propinsi, semuanya memiliki SDLR yang hampir sama yaitu dibawah 2, hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2002-2007 peningkatan angka rata-rata lama sekolah penduduk masing-masing propinsi relatif sama kecuali Irian Jaya. Adapun propinsi Irian Jaya mempunyai SDLR sebesar 9,57 yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2002-2007 penambahan angka rata-rata lama sekolah didalam propinsi tersebut sangat bervariasi.



Gambar 4.1. Deskriptif variabel kapasitas individu di 26 propinsi

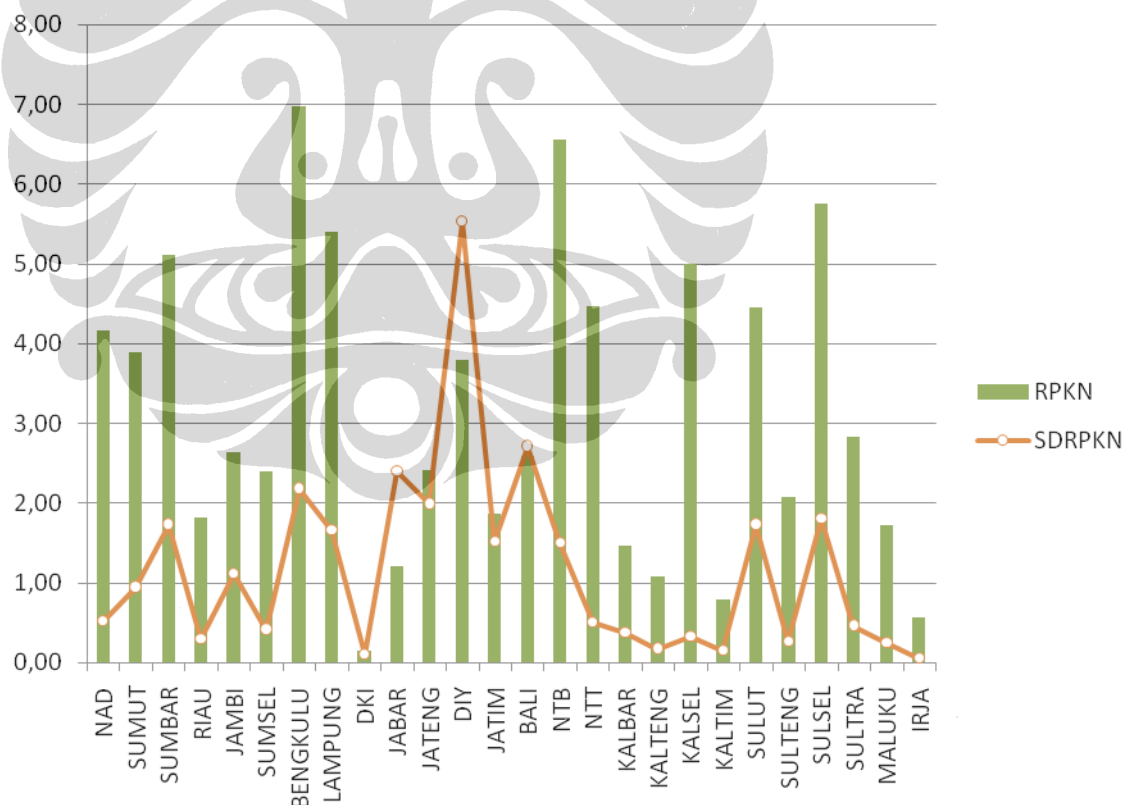
4.2.2.2. Karakteristik Aksesibilitas Dan Rumah Tangga

Berdasarkan Gambar 4.2. diketahui bahwa rata-rata prosentase rumah tangga dengan akses listrik (RTAL) tertinggi adalah DKI yaitu 99,62%, sedangkan propinsi dengan RTAL terendah adalah NTT yaitu sebesar 37,75%. Dan berdasarkan angka standar deviasi RTAL (SDRTAL) masing-masing propinsi, diketahui bahwa propinsi DKI, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara adalah propinsi-propinsi yang memiliki SDRTAL hampir sama yaitu mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi RTAL selama 2002-2007 di masing-masing propinsi tersebut relatif stabil dibandingkan propinsi lainnya. Adapun propinsi Irian Jaya mempunyai SDRTAL paling besar yaitu 21,52 yang menunjukkan bahwa distribusi RTAL di propinsi Irian Jaya selama periode 2002-2007 cukup bervariasi.



Gambar 4.2. Deskriptif variabel infrastruktur listrik dan air bersih di 26 propinsi

Adapun rata-rata prosentase rumah tangga dengan akses air bersih (RTAB) tertinggi adalah DKI yaitu 94,23%, sedangkan propinsi dengan RTAB terendah adalah Kalbar yaitu sebesar 18,14%. Dan berdasarkan angka standar deviasi RTAB (SDRTAB) masing-masing propinsi diketahui bahwa semua propinsi di Kalimantan memiliki SDRTAB yang paling rendah dibandingkan semua propinsi lainnya yaitu kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa RTAB di Kalimantan selama tahun 2002-2007 relatif merata dibandingkan propinsi lainnya. Adapun tiga propinsi lainnya yaitu Irian Jaya, NAD, dan NTB mempunyai SDRTAL yang paling besar dibandingkan propinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terutama di Irian Jaya dan NAD selama tahun 2002-2007 sangat bervariasi.

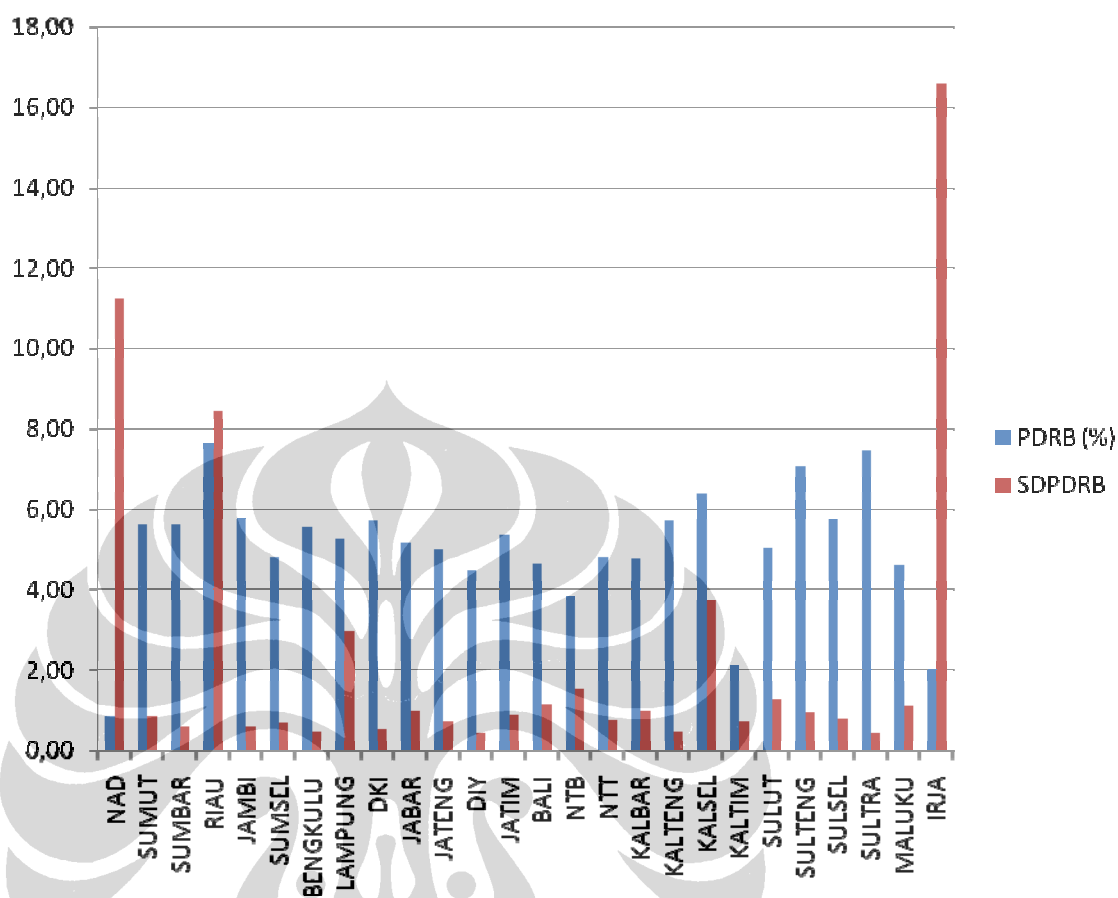


Gambar 4.3. Deskriptif variabel Pusling di 26 propinsi

Sedangkan angka rata-rata rasio puskesmas keliling terhadap luas wilayah tertinggi adalah propinsi Bengkulu yaitu sebesar 6,97, diikuti NTB (6,56) dan terakhir adalah propinsi Irian Jaya (0,57) dan DKI (0,14). Namun jika dibandingkan nilai standar devias RPKN perpropinsi, maka diketahui bahwa sejak 2002-2007 propinsi DKI, Irian Jaya, Kalteng, Kaltim, Riau dan Kalsel adalah propinsi-propinsi yang memiliki distribusi puskesmas keliling yang relatif lebih merata antar periode dibandingkan propinsi-propinsi lainnya. Adapun propinsi DIY bahkan memiliki nilai standar deviasi RPKN yang sangat ekstrim yaitu sebesar 5,53, dimana hal itu menunjukkan distribusi puskesmas keliling di DIY sangat bervariasi antar tahun dibandingkan propinsi-propinsi lainnya (Gambar 4.3).

4.2.2.3. Karakteristik Makro

Adapun rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 2002-2007 yang paling tinggi adalah propinsi Riau yaitu sebesar 7,66% diikuti oleh propinsi Sultra (7,45%) sampai yang terakhir adalah propinsi NAD (0,86%) dan Irian Jaya (1,99%). Sedangkan jika dibandingkan angka standar deviasi rata-rata pertumbuhan PDRB diketahui bahwa propinsi Irian Jaya, NAD, dan Riau adalah tiga propinsi dengan angka SDPDRB tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB di ketiga propinsi di periode 2002-2007 sangat fluktuatif dibandingkan propinsi lainnya. Adapun propinsi yang memiliki angka SDPDRB yang paling rendah dan menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDRB yang relatif stabil sejak 2002-2007 adalah propinsi Sultra (0,44%), DIY (0,46%), Kalteng (0,48%) dan DKI (0,49%) (Gambar 4.4.).

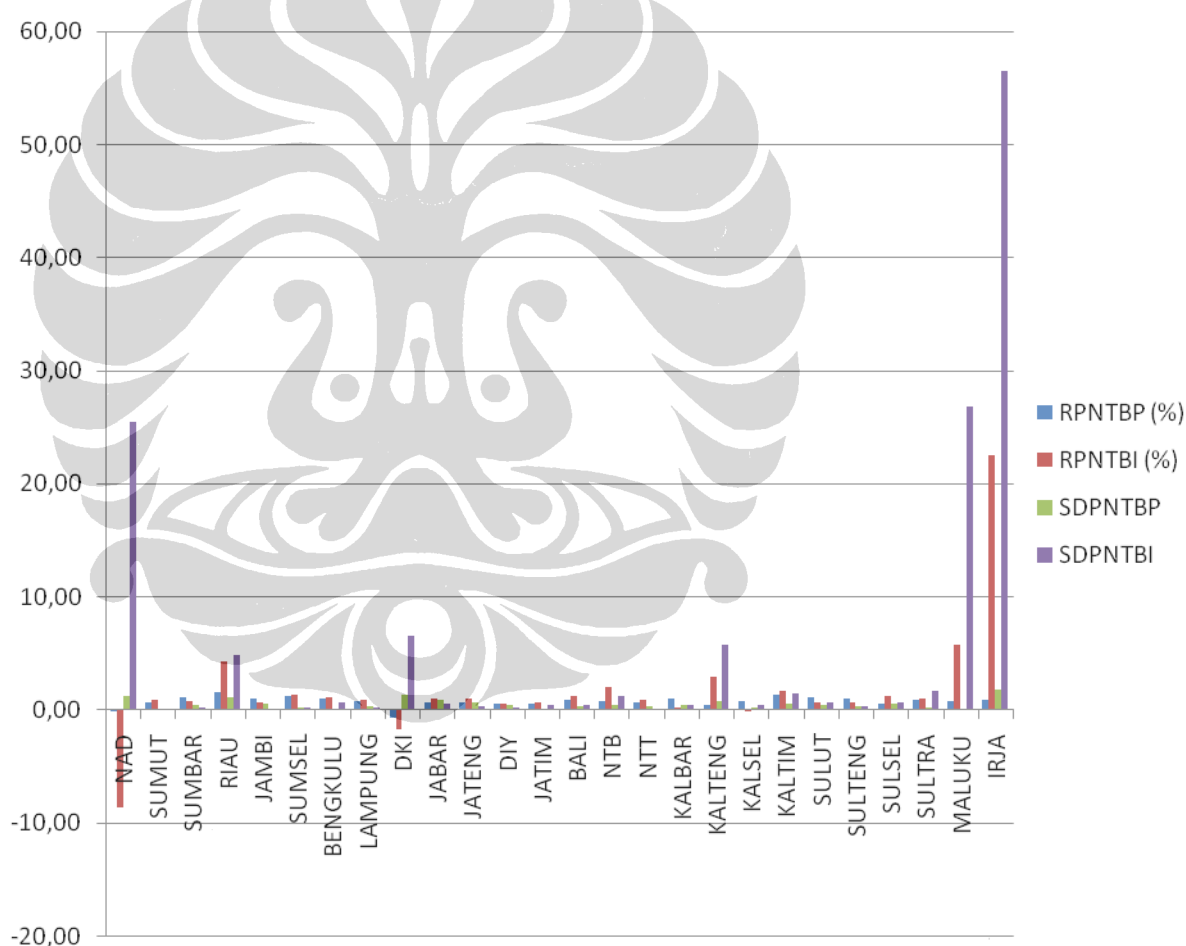


Gambar 4.4. Deskriptif variabel pertumbuhan PDRB di 26 propinsi

Sedangkan propinsi dengan rata-rata pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor pertanian yang paling tinggi adalah propinsi Riau (1,49%), Kaltim (1,26%), Sumsel (1,16%), Sulut (1,03), Kalbar (1,00%) sampai yang terendah adalah NAD (-0,13%) dan DKI (-0,78%). Sedangkan jika dibandingkan angka standar deviasi pertumbuhan NTB sektor pertanian (SDPNTBP) diketahui bahwa propinsi Irian Jaya, DKI, NAD, dan Riau adalah empat propinsi dengan angka SDPNTB tertinggi. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian selama periode 2002-2007 di empat propinsi tersebut cukup bervariasi dibandingkan propinsi-propinsi lainnya.

Adapun propinsi dengan rata-rata pertumbuhan Nilai Tambah (NTB) sektor industri yang paling tinggi adalah propinsi Irian Jaya (22,54%), Maluku

(5,76%), Kalteng (2,88%), Riau (4,21%), Kalteng (2,88%), NTB (1,96%), Kaltim (1,68%) sampai yang terakhir adalah NAD (-8,70%) dan DKI (-1,72%). Sedangkan jika dibandingkan angka standar deviasi pertumbuhan NTB sektor industri (SDPNTBI) diketahui bahwa propinsi dengan angka SDPNTBI tertinggi adalah Irian Jaya (56,54), Maluku (26,77), NAD (25,49), DKI (6,46), Kalteng (5,76), dan Riau (4,77). Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri selama periode 2002-2007 di lima propinsi tersebut sangat bervariasi dibandingkan propinsi-propinsi lainnya (Gambar.4.5).



Gambar 4.5. Pertumbuhan NTB sektor pertanian dan Industri di 26 propinsi

BPS (2007) melaporkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi selama triwulan I 2007 cenderung naik dibandingkan periode 2000-2005. Dimana Pulau Jawa, kecuali Yogyakarta, merupakan kontributor terbesar perekonomian Indonesia yaitu sebesar 59,24%. Bahkan DKI Jakarta selain merupakan propinsi penyumbang terbesar (17,70%), dengan tingkat pertumbuhan tertinggi (5,8%), propinsi ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi nasional terbesar. Sementara kontribusi propinsi Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara terhadap perekonomian hanya berkisar 0,44 % (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Propinsi kontributor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Propinsi	Sektor penyumbang terbesar Triwulan I 2007	Kontribusi propinsi terhadap PDB	
		Triwulan I 2007	Rata-rata 2000-2005
JUMLAH		59,24	58,3
DKI- Jakarta	PHR	17,7	17,1
Jawa Timur	Pertanian	14,96	15
Jawa Barat	PHR	14,58	14,4
Jawa Tengah	Ind pengolahan	8,53	8,4
Banten	Pertanian	3,47	3,4
JUMLAH		0,44	0,4
Gorontalo	Pertanian	0,12	0,1
Maluku	PHR	0,19	0,2
Maluku utara	PHR	0,13	0,1

Sumber : BPS, 2005 dan 2007 (diolah)

Adapun sektor-sektor sumber pertumbuhan propinsi-propinsi di Jawa bervariasi dari perdagangan hotel dan restoran (DKI Jakarta), pertanian (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta), dan sektor industri pengolahan (Banten). Adapun sektor-sektor sumber pertumbuhan propinsi Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara juga didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran.

Jika dibandingkan data seluruh propinsi yang dikelompokkan perpulau (Tabel 4.6), BPS (2007) melaporkan bahwa sampai pada triwulan I 2007,

propinsi-propinsi di pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebesar 60%, sedangkan pulau Sumatera merupakan penyumbang terbesar kedua, yaitu sebesar 21,96%, diikuti oleh pulau Kalimantan (8,96%), Sulawesi (4,48%), dan lainnya (1,68%).

Tabel 4.7. Pulau kontributor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pulau	Triwulan I 2007		
	Kontribusi pulau terhadap PDB Indonesia (%)	Sektor penyumbang terbesar	%
INDONESIA	100	Ind Pengolahan	1,5
Sumatera	21,96	Ind Pengolahan	1,3
Jawa	60,21	PHR	0,4
Jawa-Bali	61,46	Ind Pengolahan	1,8
Nusa Tenggara	1,46	PHR	1,0
Kalimantan	8,96	Pertambangan	1,3
Sulawesi	4,48	PHR	1,0
Lainnya	1,68	Pertambangan	27,8

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 27/05/Th. X, 15 Mei 2007 (diolah)

Sedangkan sektor yang cukup besar berkontribusi adalah sektor industri pengolahan khususnya di pulau Jawa-Bali (1,8%), Sumatera sebesar (1,5%). Adapun propinsi-propinsi lainnya (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua) secara keseluruhan menyumbang 1,68% terhadap perekonomian nasional. Propinsi terbesar dalam wilayah ini adalah Papua dengan sumbangan 1,04%. Papua mampu tumbuh 50,8% dengan pendorong utama sektor pertambangan. Jadi secara umum, nampak jelas bahwa lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masih dikendalikan oleh sektor industri pengolahan, dimana sekitar 80% industri besar dan sedang berlokasi di pulau Jawa (BPS, 2007).

4.3. Keterbatasan Penelitian

1. Realitas data khususnya data disajikan tingkat propinsi, hal ini menyebabkan rentang data yang digunakan terbatas.
2. Definisi dan konsep kemiskinan yang digunakan hanya dipandang (didekati) dari satu dimensi yaitu ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (memenuhi standar minimal tertentu) padahal dimensi kemiskinan adalah sangat kompleks (ada dimensi sosial, politik, dan budaya) sebagaimana telah diuraikan pada Bab II (Landasan Teori).

